

Terakreditasi No. : 605/AU4/P2MI-LIPI/03/2015

PATRAWIDYA

seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya

**Hubungan Antar Umat Beragama di Kaimana
dalam Tinjauan Sejarah Sosial
Oleh: Cahyo Pamungkas**

**Aktualisasi Pokok Adat Suku Tolaki Melalui Simbol *Kalo*
dalam Mitos “Oheo”
Oleh: Heksa Biopsi Puji Hastuti**

**Wacana “Satu Bahasa” dalam Historiografi Pendidikan Indonesia
Oleh: Hieronymus Purwanta**

**Integrasi Sosial Antara Penduduk Lokal dan Pendatang
di Kota Bengkulu dalam Perspektif Sejarah
Oleh: Jumhari**

**Dari Malaysia ke Jawa: Transformasi Sosial-Ekonomi Migran-
Kembali di Kabupaten Grobogan Tahun 1990-2010
Oleh: Lucia Juningsih**

**Kontestasi Pelestarian Warisan Budaya di Trowulan
Oleh: Sugih Biantoro**

**Makna Sapi *Kerapan* dari Perspektif Orang Madura
Kajian Sosial, Ekonomi, Budaya
Oleh: Sumintarsih**

**Kentongan: Pusat Informasi, Identitas dan Keharmonisan
pada Masyarakat Jawa
Oleh: Surono**

**PATRA
WIDYA**
seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya

Vol. 16

No. 1

Hal. 1 - 156

Yogyakarta
Maret 2015

ISSN 1411-5239

Patrawidya merupakan seri penerbitan hasil penelitian Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta dan peneliti tamu, serta penulis undangan yang meliputi bidang sejarah dan budaya. **Patrawidya** terbit secara berkala tiga bulan sekali, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nama **Patrawidya** berasal dari gabungan dua kata "**patra**" dan "**widya**", yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Jawa Kuna. Kata "**patra**" berasal dari kata "**pattra**", dari akar kata *pat*=melayang, yang kemudian diartikan sayap burung; bulu; daun; daun bunga; tanaman yang harum semerbak; daun yang digunakan untuk ditulisi; surat; dokumen; logam tipis atau daun emas. Adapun kata "**widya**" berasal dari kata "**vidyā**", dari akar kata *vid*=tahu, yang kemudian diartikan 'ilmu pengetahuan'. "**Patrawidya**" diartikan sebagai 'lembaran yang berisi ilmu pengetahuan'.

DEWAN REDAKSI PATRAWIDYA

Pelindung	: Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung Jawab	: Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
Mitra Bestari	: Prof. Dr. Djoko Suryo (Sejarah) Prof. Dr. Su Ritohardoyo, MA (Geografi) Prof. Dr. Wasino, M.Hum (Sejarah)
Penyunting Ahli	: Prof. Dr. Suhartono Wiryopranoto (Sejarah) Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A. (Antropologi)
Penyunting Bahasa Inggris	: Drs. Edi Pursubaryanto, M.Hum
Ketua Dewan Redaksi Sekretaris	: Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum. (Sejarah) : Ernawati Purwaningsih, S.Si., M.Sc. (Geografi) Indra Fibiona, S.S (Sejarah)
Dewan Redaksi	: Dra. Sumintarsih, M.Hum (Antropologi) Dra. Suyami, M.Hum (Sastra Jawa) Dra. Emiliana Sadilah (Geografi) Yustina Hastrini Nurwanti, S.S (Sejarah) Drs. Bambang H. Suta Purwana (Antropologi)
Distributor	: Drs. Sumardi, MM

Alamat Redaksi:

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
Jalan Brigjen Katamso 139, *Dalem* Jayadipuran Yogyakarta 55152
Telp. (0274) 373241, 379308 Fax. (0274) 381555
e-mail:patrawidya@bpb-jogja.info | Website:<http://www.bpb-jogja.info>

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenannya Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta dapat menerbitkan hasil penelitian yang dikemas dalam jurnal *Patrawidya* Seri Sejarah dan Budaya Vol. 16 No.1, Maret 2015. Jurnal *Patrawidya* edisi ini memuat beberapa artikel dalam bidang sejarah dan budaya, hasil penelitian Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, peneliti tamu dan peneliti undangan.

Jurnal *Patrawidya* yang sampai ke hadapan para pembaca berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Dewan Redaksi *Patrawidya* dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari yang telah meluangkan waktu untuk membaca semua artikel dan memberi pertimbangan terhadap isi artikel. ucapan terima kasih juga kami sampai kepada editor bahasa Inggris.

Mengawali edisi tahun 2015, *Patrawidya* menghadirkan delapan artikel sejarah dan budaya. Dua artikel membahas tentang bertemunya penduduk lokal dengan pendatang. Artikel Cahyo Pamungkas yang menjadi pembuka edisi Maret ini, membahas tentang hubungan antar umat beragama di Kaimana, yang dilihat dari perspektif sejarah. Perjumpaan antara pendatang baik yang Muslim, Kristen dan yang lainnya tidak menjadi masalah bagi orang Kaimana sebab mereka memiliki identitas keluarga yang menjadi pemersatu. Tulisan lainnya dari Jumhari yang membahas tentang integrasi sosial antara penduduk lokal dengan pendatang di Kota Bengkulu. Tulisan Jumhari juga memakai perspektif sejarah untuk mengupas masalah tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa realitas sosial masyarakat multietnik dibangun oleh ikatan dan identitas kesukuan di Bengkulu merupakan manifestasi dari adanya interaksi, komunikasi dan integrasi sosial.

Masih dalam ranah artikel kesejarahan, Lucia Juningsih hadir melalui hasil penelitiannya tentang transformasi sosial ekonomi migran kembali di Kabupaten Grobogan. Babagan waktu yang diambil antara tahun 1990-2010. Migran tersebut semula bekerja di Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa para migran-kembali dapat dibedakan dalam dua kelompok, yakni kelompok yang mengalami mobilitas sosial vertikal dan kelompok yang tidak mengalami transformasi sosial ekonomi (hanya mengalami mobilitas horisontal) dari buruh kembali ke buruh, posisi mereka tetap di pinggiran. *Kontestasi Pelestarian Warisan Budaya di Trowulan* menjadi perhatian Sugih Biantoro. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relasi antar pihak yang berkepentingan dapat menciptakan kontestasi antar mereka dan besar pengaruhnya terhadap keberhasilan upaya pelestarian di Trowulan. Artikel *Wacana "Satu Bahasa" dalam Historiografi Pendidikan Indonesia* ditulis oleh Hieronymus Purwanta yang menggali kepentingan dan ideologi yang berada di balik wacana "satu bahasa" yang diproduksi dan direproduksi oleh pemerintah Orde Baru. Menurut Purwanta wacana "satu bahasa" menjadi salah satu sebab ditinggalkannya identitas yang bersifat tradisional dan kesukuan untuk digantikan dengan identitas nasional yang modern.

Artikel yang lainnya berasal dari Heksa Biopsi Puji Hastuti yang mengupas tentang Aktualisasi adat Suku Tolaki yang dilihat dari simbol *Kalo* dalam mitos *Oheo*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam mitos *Oheo* simbol *kalo* hadir dalam pokok adat *sara mbedulu* (pokok adat dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan) dan *sara mandara* (pokok adat pekerjaan ketrampilan dan keahlian). Sumintarsih menulis tentang *Makna Sapi Kerapan dari Perspektif Orang Madura Kajian Sosial, Ekonomi, Budaya* dengan pendekatan etnosains. Menurut Sumintarsih sapi *kerapan* bagi orang *pengerap* tidak hanya menunjukkan sebagai orang kuat dari segi sosial ekonomi tetapi sekaligus sebagai simbol

prestise keluarganya di masyarakat, serta simbol kebanggaan sebagai penerus tradisi nenek moyang. Pada gilirannya sapi *kerap* juga memiliki nilai jual yang tinggi. Kemenangan sapi *kerap* menjadi simbol keberhasilan dan kebanggaan bagi joki dan perawatnya. Dalam praktiknya sapi *kerapan* terkandung makna relasional, dan ambisi juragan pemilik sapi untuk memperoleh kemenangan.

Edisi nomor ini ditutup oleh Surono melalui artikelnya berjudul *Kentongan: Pusat Informasi, Identitas dan Keharmonisan pada Masyarakat Jawa*. Hasil penelitian Surono menunjukkan bahwa kentongan di masyarakat Jawa berfungsi sebagai pesan ritual keagamaan, pesan akan terjadinya sesuatu, dan sarana mengundang seseorang untuk hadir dalam acara tertentu. Di samping itu juga bermakna sebagai identitas masyarakat, status sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Untuk lebih detainya dapat dibaca dalam artikel utuh yang ada di jurnal ini.

Ibarat pepatah “tiada gading yang tak retak”, penerbitan jurnal *Patrawidya* Seri Sejarah dan Budaya Vol. 16 No. 1, Maret 2015 ini masih ada kekurangannya. Namun begitu kami berharap semoga hasil terbitan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan jurnal ini. Selamat membaca.

DEWAN REDAKSI

Seri Sejarah dan Budaya

PATRAWIDYA

Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya

- Pengantar Redaksi
- Daftar Isi
- Abstrak
- Cahyo Pamungkas - Hubungan Antar Umat Beragama di Kaimana dalam Tinjauan Sejarah Sosial (hlm. 1 - 18).
- Heksa Biopsi Puji Hastuti - Aktualisasi Pokok Adat Suku Tolaki Melalui Simbol *Kalo* dalam Mitos “Oheo” (hlm. 19 - 38).
- Hieronymus Purwanta - Wacana “Satu Bahasa” dalam Historiografi Pendidikan Indonesia (hlm. 39 - 56).
- Jumhari - Integrasi Sosial Antara Penduduk Lokal dan Pendetang di Kota Bengkulu dalam Perspektif Sejarah (hlm. 57 - 74).
- Lucia Juningsih - Dari Malaysia ke Jawa: Transformasi Sosial-Ekonomi Migran-Kembali di Kabupaten Grobogan Tahun 1990-2010 (hlm. 75 - 94).
- Sugih Biantoro - Kontestasi Pelestarian Warisan Budaya di Trowulan (hlm. 95 - 110).
- Sumintarsih - Makna Sapi *Kerapan* dari Perspektif Orang Madura Kajian Sosial, Ekonomi, Budaya (hlm. 111 - 138).
- Surono - Kentongan: Pusat Informasi, Identitas dan Keharmonisan pada Masyarakat Jawa (hlm. 139 - 156).

WACANA “SATU BAHASA” DALAM HISTORIOGRAFI PENDIDIKAN INDONESIA

Hieronymus Purwanta

Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra,
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Jl. Affandi, Mrican, Yogyakarta
e-mail: purwantah@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pelestari dan pengembang ilmu pengetahuan, tetapi oleh kelompok penguasa juga dilibatkan pada pencapaian tujuan-tujuan politik. Penelitian ini mencoba menggali kepentingan dan ideologi yang berada di balik wacana “satu bahasa” yang diproduksi dan reproduksi oleh pemerintah Orde Baru melalui historiografi pendidikan. Metode yang digunakan adalah dengan mengkaji buku teks pelajaran sejarah untuk siswa SMA yang berlaku pada kurikulum nasional tahun 1975, 1984 dan 1994 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Hasil penelitian menemukan bahwa ideologi modernisme yang dianut oleh Orde Baru mendorongnya untuk membangun identitas nasional yang sesuai dengan pembangunan, yaitu manusia Pancasila atau homo Pancasilaensis. Wacana “satu bahasa” menjadi salah satu ikon ditinggalkannya identitas lokal yang bersifat tradisional dan kesukuan untuk digantikan dengan identitas nasional yang modern.

Kata kunci: historiografi, historiografi pendidikan, buku teks, wacana, satu bahasa, orde baru, identitas nasional, homo pancasilaensis

DISCOURSE OF “ONE LANGUAGE” IN INDONESIAN EDUCATION HISTORIOGRAPHY

Abstract

Education institutions not only serve in preserving and developing knowledge, but by the ruling group are also involved in the achievement of political goals. This research attempts to explore interests and ideology lie behind “one language” discourse which were produced and reproduced by New Order through education historiography. The method used is through reviewing history textbooks for high school students those applied in 1975's, 1984's and 1994's national curriculums. The results found that the ideology of modernism embraced by the New Order drive them to build a national identity which support to the development, called Pancasila's people or homo Pancasilaensis. Discourse “one language” became one of the icons that representing abandonment of traditional, local, ethnical and primordial identity to be replaced with a modern national identity.

Keywords: education historiography, history textbook, discourse, “one language”, new order, national identity, homo Pancasilaensis.

I. PENDAHULUAN

Setiap tahun, masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya, dengan penuh semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Peringatan itu, dalam berbagai bentuknya, ingin mengenang dan menginternalisasi gelegak nasionalisme yang dipahami sebagai begitu tinggi membakar dada para pemuda pada tahun 1928. Momentum sejarah itu seakan menjadi sumber air yang tak pernah kering, tempat anak-anak muda melepaskan dahaga nasionalismenya. Dari sudut pandang ini, peringatan menjadi media untuk mewariskan identitas nasional kepada generasi muda Indonesia.

Seperti terhadap hari-hari bersejarah lainnya, peringatan hari sumpah pemuda, dipandang sangat penting bagi keberlangsungan negara bangsa. Sebagai *civic nation*,

pewarisan identitas nasional melalui peringatan berbagai peristiwa sejarah menjadi sebuah keharusan, agar generasi mudanya tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan oleh para *founding fathers* pada 17 Agustus 1945. Meminjam pemikiran Renan, peranan sejarah, baik narasi maupun memori, adalah sangat penting dalam bangun identitas nasional sebuah bangsa:

The nation, like the individual, is the outcome of a long and strenuous past of sacrifice and devotion. Of all cults, the cult of ancestors is the most legitimate, since our ancestors have made us what we are. A heroic past of great men, of glory (I mean genuine glory): this is the social capital on which a national idea is established. To have common glories in the past and common will in the present; to have done great things together and to will that we do them again: these are the conditions essential to being a people (Renan, 1882: 58).

Pada kutipan di atas, Renan secara jelas menggunakan sejarah sebagai tumpuan utamanya. Dia menyatakan bahwa bangsa, sebagaimana perseorangan, merupakan hasil dari masa lampau yang panjang dan penuh pengorbanan dan kebaktian. Di antara semua kebudayaan, budaya para leluhur adalah yang paling sah, karena para leluhurlah yang membuat kita seperti sekarang ini. Masa lampau orang-orang besar yang heroik merupakan modal sosial tempat bersemainya gagasan tentang negara bangsa. Memiliki kebesaran masa lampau dan semangat untuk secara bersama membuat keberhasilan besar pada masa kini dan mendatang merupakan hal yang mendasar sebagai rakyat.

Pentingnya peranan pendidikan sejarah dalam menanamkan identitas nasional, menjadikan sejarah sebagai salah satu mata pelajaran yang rentan untuk dimasuki kepentingan-kepentingan lain di luar tanggungjawabnya. Apple (2000: 43-44), mencoba menjelaskan keterkaitan antara sekolah dan ilmu yang dikembangkannya dengan masyarakat sebagai berikut:

For some groups of people, schooling is seen as a vast engine of democracy: opening horizons, ensuring mobility, and so on. For others, the reality of schooling is strikingly different. It is seen as a form of social control, or, perhaps, as the embodiment of cultural dangers, institutions whose curricula and teaching practices threaten the moral universe of the students who attend them.

While not all of us may agree with this diagnosis of what schools do, this latter position contains a very important insight. It recognizes that behind Spencer's famous question about "What knowledge is of most worth?" there lies another even more contentious question, "Whose knowledge is of most worth?"

During the past two decades, a good deal of progress has been made on answering the question of whose knowledge becomes socially legitimate in schools. While much still remains to be understood, we are now much closer to having an adequate understanding of the relationship between school knowledge and the larger society than before. Yet, little attention has actually been paid to that one artifact that plays such a major role in defining whose culture is taught: the textbook.

Pada dua alinea pertama kutipan di atas, Apple tentang fungsi sekolah bagi kelompok-kelompok kepentingan yang berkembang di masyarakat. Bahkan dengan menggunakan pertanyaan tentang "pengetahuan siapa yang paling baik diajarkan di sekolah?", Apple berusaha menjelaskan bahwa sampai apa yang diajarkan di sekolah pun sarat dengan kepentingan subyektif. Dari sudut pandang ini, sekolah merupakan institusi yang rentan terhadap pengaruh dari kelompok kepentingan (yang berkuasa).

Pada alinea terakhir kutipan di atas, Apple mengingatkan bahwa keterkaitan antara "ilmu pengetahuan yang paling layak diajarkan" di sekolah dengan kelompok kepentingan di masyarakat. Salah satu pintu masuk yang digunakan oleh kelompok penguasa untuk mempengaruhi generasi muda (siswa sekolah) adalah buku teks atau buku yang digunakan

siswa untuk mata pelajaran tertentu.

Sesuai dengan judul, yaitu historiografi pendidikan, dan terinspirasi oleh pandangan Apple, penelitian ini akan mengkaji buku teks pelajaran sejarah. Dalam ilmu sejarah, historiografi adalah bidang yang mempelajari perkembangan penulisan sejarah. Dalam historiografi terdapat banyak konsentrasi kajian, sesuai dengan perkembangan penulisan sejarah, seperti historiografi tradisional, modern, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Historiografi pendidikan merupakan sub bidang historiografi yang menjadikan buku teks pelajaran sejarah sebagai konsentrasi kajian.

Pada penelitian historiografi pendidikan kali ini, perhatian akan difokuskan pada produksi dan reproduksi wacana “satu bahasa”. Pertanyaan utama penelitian ini adalah: kepentingan apa saja yang berada di balik produksi wacana “satu bahasa” yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru? Untuk menelusuri jejak produksi wacana oleh pemerintah itu digunakan buku-buku teks pelajaran sejarah SMA yang digunakan pada masa Orde Baru, yang mencakup masa berlakunya kurikulum tahun 1975, 1984 dan 1994.

Di pihak lain, dalam rangka menelisik kepentingan pemerintah Orde Baru, buku teks pelajaran sejarah dalam studi ini dipandang sebagai “ekspresi subjektif” yang menandakan keberadaan kepentingan dan kekuasaan sebagai konteks dalam produksi dan reproduksi wacana (Wodak and Meyer, 2006: 24). Dengan kata lain, istilah “satu bahasa” adalah “*not only the object of a particular knowledge, but also the object of a vision*” (Spivak dalam Derrida, 1997: lviii). Melalui penempatan uraian buku teks sebagai “ekspresi subjektif” kepentingan kekuasaan, analisis dimungkinkan untuk menangkap asumsi, ideologi dan pesan yang diwacanakan dan disampaikan oleh buku teks kepada siswa sebagai audien (Crawford, 2001: 327). Asumsi, ideologi dan pesan yang diwacanakan, dalam kajian ini, hadir terutama dalam bentuk istilah “satu bahasa”.

II. PRODUKSI WACANA “SATU BAHASA” DALAM HISTORIOGRAFI PENDIDIKAN

Wacana “satu bahasa” diambil dari peristiwa sejarah perkembangan nasionalisme Indonesia yang terkenal sebagai Sumpah Pemuda. Ketika ditanyakan kepada siswa SMA ataupun mahasiswa tentang isi Sumpah Pemuda, dengan cepat kita akan memperoleh jawaban “satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa”. Jawaban itu sama sekali tidak salah, karena sumber belajar mereka mengatakan demikian.

Sekilas tidak ada yang aneh dengan jawaban yang diberikan peserta didik atas pertanyaan tentang isi Sumpah Pemuda di atas. Akan tetapi, jawaban “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” akan menjadi menarik untuk dicermati dan diteliti apabila dibandingkan dengan isi lengkap Keputusan Kongres Pemuda tahun 1928 (Utomo, 2012: 5) sebagai berikut.

*POETOESAN CONGRES
PEMOEDA PEMOEDA INDONESIA*

Kerapatan poemoeda-poemeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja: Jong Java, Jong Soematera (Poemoeda Soematera), Poemuda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Batakbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia:

Memboeka rapat pada tanggal 27-28 october tahoen 1928 di negeri Djakarta; Sesoedahnja mendengar pidato-pidato dan pemitjaraan jang diadakan dalam kerapatan tadi; sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pemitjaraan ini; kerapatan laloe mengambil poetoesan:

Pertama:

KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA

Kedua:

KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA

Ketiga:

KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Batavia, 28 Oktober 1928

Dari Keputusan Kongres Pemuda itu, ketiga kalimat terakhir kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Apabila dibandingkan dengan istilah “satu nusa, satu bangsa satu bahasa”, dua istilah yang pertama relatif selaras. “Bertumpah darah yang satu” selaras dengan “satu nusa”, dan “berbangsa yang satu” selaras dengan “satu bangsa”. Akan tetapi, “menjunjung bahasa persatuan” tidak dapat dipandang selaras dengan “satu bahasa”. Menjunjung bahasa persatuan memiliki arti bahwa menghargai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar etnik. Di pihak lain, apabila interaksi terjadi antar anggota satu etnik (internal), alat komunikasi yang digunakan adalah bahasa daerah.

Dengan membandingkan “endapan ingatan” yang ada dalam diri peserta didik dengan isi Sumpah Pemuda yang asli, dapat dilihat bahwa selama ini telah terjadi distorsi makna isi Sumpah Pemuda, terutama dari “menjunjung bahasa persatuan” menjadi “satu bahasa”. Istilah “satu bahasa” memiliki arti bahwa bahasa Indonesia menjadi satu-satunya alat komunikasi yang berlaku, baik inter maupun antar etnik. Di pihak lain, keberadaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi menjadi dipertanyakan kedudukannya.

Distorsi makna dari “menjunjung bahasa persatuan” menjadi “satu bahasa” tidak dapat dipandang sebagai ketidaksengajaan atau bahkan keteledoran, karena telah diproduksi dan disosialisasikan melalui lembaga pendidikan dan berlangsung bertahun-tahun. Dari sudut pandang ini, distorsi makna merupakan kesengajaan atau diwacanakan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa pemerintah dengan sengaja mewacanakan “satu bahasa”?

Dari penelusuran yang dilakukan, wacana “satu bahasa” telah muncul pada buku teks pelajaran sejarah SMA sejak kurikulum 1975. Pada buku paket, yaitu buku teks pelajaran sejarah yang diterbitkan oleh pemerintah dan dibagikan ke sekolah secara gratis, dijelaskan sebagai berikut:

Puncak dari peranan elite nasional dalam menumbuhkan nasionalisme tercapai dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia. Di sini dengan tegas telah dicamkan ide nasionalisme Indonesia dalam hati sanubari rakyat di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. (Notosusanto, 1981: 28)

Dari kutipan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah “Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia”. Bahkan pada kalimat berikutnya dituliskan bahwa “Di sini dengan tegas telah dicamkan ide nasionalisme Indonesia dalam hati sanubari rakyat di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke”. Kedua kalimat itu menandakan bahwa penulis hendak menyampaikan pesan kepada para siswa bahwa satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa adalah representasi dari merasuknya nasionalisme dalam sanubari rakyat.

Dengan gaya yang berbeda, yaitu menggunakan pendekatan naratif, penulis buku teks pelajaran sejarah yang lain, yaitu Widyosiswoyo (1979: 181), memberi uraian sebagai berikut:

Kongres Pemuda Indonesia II diadakan akhir Oktober 1928 di Jakarta. Pada hari terakhir kongres tanggal 28 Oktober 1928 bertempat di Jalan Kramat Raya nomor 126 Jakarta diambil keputusan yang sangat penting yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah itu berisi pengakuan:

- Bertanah air satu, tanah air Indonesia,
- Berbangsa satu, bangsa Indonesia,
- Berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Meskipun secara substansi sama dengan isi buku paket, tetapi Widysiswoyo memberikan narasi yang lebih jelas dan lebih tegas bahwa melalui Sumpah Pemuda, muncul komitmen diantara generasi muda zaman pergerakan untuk “Berbahasa satu, bahasa Indonesia”.

Wacana “satu bahasa” juga direproduksi pada buku-buku teks pelajaran sejarah untuk kurikulum 1984. Selain melalui cetak ulang buku paket karangan Nugroho Notosusanto dan kawan-kawan (dkk) (1992), reproduksi wacana “satu bahasa” juga dapat ditemukan pada buku teks karangan Moedjanto dkk. (1992, jilid 2: 14) sebagai berikut:

Salah satu puncak pergerakan adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa menunjukkan semakin mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme telah ditegakkan, sehingga dasar pergerakan dan perjuangan pada fase berikutnya telah dimiliki.

Pada kutipan di atas terlihat penulis menyampaikan pesan kepada para siswa sebagai pembacanya bahwa “satu bahasa”, tentu saja bersama “satu nusa” dan “satu bangsa”, merupakan wujud dari “semakin mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa”.

Pada buku teks pelajaran sejarah karangan Soewarso (1986: 41), wacana “satu bahasa” direproduksi secara naratif sebagai berikut:

Konggres pemuda yang ke II diadakan tanggal 26 28 Oktober 1928. Dibicarakan kembali langkah/usaha mempersatukan pemuda seluruh Indonesia. Akan tetapi belum juga berhasil. Dalam kongres tersebut wakil-wakil pemuda seluruh Indonesia menyatakan ikrar kebulatan tekad, yang mengakui:

- Berbangsa satu, Bangsa Indonesia
- Bertanah air satu, Tanah air Indonesia.
- Berbahasa satu, Bahasa Indonesia.

Peristiwa tahun 1928 itulah yang hingga sekarang kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda.

Dari narasi di atas dapat dipahami bahwa penulis, Soewarso, memaknai “satu bahasa” sebagai salah satu bentuk kebulatan tekad wakil-wakil pemuda seluruh Indonesia. Dari sudut pandang ini, penulis mereproduksi wacana “satu bahasa” dengan menyampaikan pesan kepada para siswa bahwa “Berbahasa satu, Bahasa Indonesia” merupakan wujud melestarikan kebulatan tekad yang terkandung pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Pada masa berlakunya kurikulum 1994, wacana “satu bahasa” terlihat sudah tidak gencar lagi direproduksi. Dari penelusuran terhadap buku-buku teks pelajaran sejarah yang terbit pada periode ini, ditemukan hanya satu buku yang mereproduksi wacana “satu bahasa”, yaitu buku teks karangan Badrika. Dalam buku itu penulis menjelaskan sebagai berikut:

Momentum sejarah kedua adalah Sumpah Pemuda. Peristiwa itu merupakan kristalisasi dari seluruh aspirasi dan cita-cita masyarakat Indonesia waktu itu untuk bersatu, memerdekakan diri dari penjajah. Landasan Sumpah Pemuda termuat dalam triloginya yakni satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Sebagai satu tanah air, rakyat Indonesia hendaknya bersatu merebutnya dari tangan penjajah. Satu

bangsa bahwa seluruh pergerakan yang ada waktu itu hendaknya berani tampil dengan ciri kebangsaannya yang tulen yakni bangsa Indonesia. Satu bahasa adalah salah satu alat perjuangan untuk mengindonesiakan Hindia Belanda. (Badrika, 1997: 158)

Dari kutipan di atas, dengan jelas dapat ditengarai bahwa penulis mereproduksi wacana “satu bahasa” dengan menempatkannya sebagai “salah satu alat perjuangan untuk mengindonesiakan Hindia Belanda”.

Penelusuran melalui buku teks mata pelajaran sejarah SMA yang berlaku pada tiga periode kurikulum, kiranya dapat memberi gambaran relatif jelas bahwa proses produksi wacana “satu nusa satu bangsa dan satu bahasa” di dunia pendidikan sangat lah kuat. Dari sudut pandang ini, jawaban pelajar dan mahasiswa tentang Sumpah Pemuda sebagai “satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa” di atas, merupakan hasil dari suatu proses produksi wacana yang diinfuskan melalui mata pelajaran sejarah dan berlangsung selama bertahun tahun. Dengan kata lain, kebenaran bahwa sumpah pemuda berisi “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” merupakan hasil proses produksi “kebenaran” yang panjang dan berlangsung sangat halus.

Wacana “satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa” tidak hanya diproduksi melalui buku teks sejarah SMA. Produksi wacana itu juga dilakukan melalui sebuah lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa karangan Liberty Manik. Lagu tersebut menjadi bagian industri wacana dalam dunia pendidikan ketika ditempatkan sebagai lagu wajib nasional yang harus dikuasai oleh para pelajar. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

Satu Nusa Satu Bangsa

Es = do, 4/4. Andante L. Manik



Satu nu-sa sa-tu bangsa sa-tu baha-sa ki-ta.
Tanah a-ir pas-ti ja-ya un-tuk slama la-manya.
In-donesia pu-sa-ka In-donesia ter-cin-ta,
Nu-sa bangsa dan ba-ha-sa ki-ta bela bersa-ma.

Dari syairnya, lagu tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa “satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa” merupakan jalan atau prasyarat menuju kejayaan tanah air.

Meski Orde Baru telah tumbang pada tahun 1998 dan digantikan oleh Orde Reformasi, produksi wacana “satu bahasa” melalui buku teks pelajaran sejarah tetap berlangsung. Pada buku *Sejarah SMA/MA* karangan Tarunasena (2009: 264) yang digunakan pada Kurikulum 2006, wacana “satu bahasa” dimanifestasikan sebagai hasil belajar dari Pendidikan Barat

yang berkembang di Indonesia sebagai berikut:

Para tokoh pergerakan Nasional Indonesia yang pada umumnya telah mengenyam pendidikan Barat tampaknya telah membaca dan mempelajari pemikiran-pemikiran yang berhasil dikembangkan pada masa revolusi Prancis. Paham-paham yang muncul pasca revolusi Prancis memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi pergerakan nasional Indonesia. Hal ini misalnya terlihat dari derasnya arus semangat nasionalisme yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Paham nasionalisme yang merupakan hasil revolusi Prancis juga dicoba untuk ditanamkan di seluruh kalangan rakyat, sehingga tercapailah persatuan dan kesatuan. Hal ini terlihat dengan terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda berhasil memperkuat jiwa nasionalisme dengan mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

Tidak jauh berbeda dengan buku teks karangan Tarunasena, buku Sejarah Jilid 2 karangan Mustopo (2007: 167-168) juga memproduksi wacana "satu bahasa" ketika membahas Jong Java sebagai berikut:

Pada kongres Jong Java tanggal 27-31 Desember 1926 di Solo, dengan suara bulat tujuan Jong Java diubah menjadi "memajukan rasa persatuan para anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia dan bekerja sarna dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya ikut serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham Indonesia bersatu." Semangat satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang menyala di berbagai tempat semakin mendorong Jong Java untuk melakukan fusi.

Tetap diproduksi wacana "satu bahasa" pada masa Reformasi merupakan fenomena yang menarik, karena ditinjau dari sistem penerbitan buku teks di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup besar. Pada masa berlakunya Kurikulum 1994, pemerintah memberikan keleluasaan kepada pihak sekolah dan guru untuk memilih sendiri buku teks yang hendak digunakan. Kebijakan itu menjadikan berkembangnya penerbitan buku teks oleh penerbit swasta. Pada masa berlakunya Kurikulum, penerbitan buku teks dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Badan itu menyeleksi dan menentukan buku-buku teks yang layak dan tidak layak. Bagi buku teks yang lolos seleksi, akan dibeli pemerintah dan diterbitkan secara nasional sebagai buku elektronik.

Dari sistem industri buku teks yang berlaku sejak berlakunya Kurikulum 2006, isi dan wacana buku teks yang lolos seleksi paling tidak diketahui dan disetujui oleh pemerintah. Buku teks Sejarah SMA/MA karangan Tarunasena adalah salah satu yang lolos seleksi dan diterbitkan dalam bentuk buku elektronik. Dari sudut pandang ini, wacana "satu bahasa" yang dinarasikan pun sudah disetujui oleh pemerintah zaman Reformasi. Dengan kata lain, meskipun secara politik telah terjadi pergantian penguasa, tetapi ideologi yang melatarbelakangi diproduksi wacana "satu bahasa" relatif tetap.

Konteks. Wacana "satu bahasa" tidak tiba-tiba jatuh dari langit maupun lahir dari ruang hampa. Sebaliknya, terdapat realitas sosial, problem aktual dan pemikiran sangat mapan dari kelompok penguasa yang melatarbelakanginya. Dari perspektif realitas sosial, salah satu permasalahan yang paling pelik adalah kondisi pluralitas masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri lebih dari 300 suku dengan suku Jawa sebagai yang terbesar (41.71%), disusul Melayu (3.45%) dan Batak (3.02%), tanpa bermaksud mengabaikan eksistensi suku-suku lain jumlahnya kurang dari 3%. Dari suku-suku yang ada di Indonesia, melahirkan lebih dari 700 bahasa lokal. Hal itu karena, setiap etnik telah berkembang menjadi banyak sub etnik dan masing-masing mengembangkan bahasa sendiri. Sebagai contoh adalah etnik Dayak di Kalimantan. Antar sub etnik Dayak tidak dapat berkomunikasi, karena masing-masing telah memiliki kosa kata yang sangat berbeda. Keanekaragaman itu secara kultural mengakibatkan terjadinya perbedaan pola pikir dan pola tindak antar etnik yang tidak jarang memicu konflik.

Keanekaragaman sosial budaya masyarakat Indonesia merupakan masalah dalam

membangun identitas nasional. Diskusi, debat dan polemik tentang bangun identitas nasional bangsa Indonesia pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, bahkan dari sebelum merdeka. Pada tahun 1935, dalam Permusyawaratan Perguruan Indonesia, perdebatan terjadi antara Sutan Takdir Alsjahbana dengan kelompok Ki Hadjar Dewantara yang berlanjut menjadi polemik di surat kabar. Sutan Takdir menghendaki Indonesia mengadopsi nilai-nilai Barat, sedang kelompok Ki Hadjar menghendaki pengembangan budaya lokal (Mihardja, 1986). Perdebatan tentang identitas nasional, meski tidak berlangsung secara terbuka, kembali terjadi pada awal tahun 1950-an antara kelompok Gelanggang yang menganggap diri sebagai pewaris kebudayaan dunia seperti tertulis pada “Surat dari Gelanggang” dengan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang menempatkan kepentingan rakyat Indonesia sebagai orientasi (realisme sosial) seperti tertulis pada “Preamble”.

Pada tahun 1957, dalam Seminar Sejarah Nasional pertama di Yogyakarta, perdebatan juga terjadi antara Soedjatmoko yang berorientasi ke Barat dengan Mohammad Yamin yang menghendaki keindonesiaan sebagai landasan filosofis ilmu sejarah.

In a landmark First National Seminar in 1957, the tension between methodologically sound, “scientific” history and its ideologically-informed nationalist counterparts came to the fore. Asked to speak on the philosophy that ought to inform history writing, Soedjatmoko and Yamin took clearly opposing sides. The former warned forcefully against the danger of allowing history to be used to promote nationalist projects and pushed for strict adherence to standard historical methodology (Soedjatmoko 1973). Yamin asserted in equally strong terms the need for Indonesian history to be written from a nationalist perspective and to help promote national consciousness and unity (Yamin 1957) (Curaming, 2002).

Pada masa Orde Baru perdebatan dan polemik tidak lagi terjadi dengan terbuka. Salah satu penyebabnya adalah karena Orde Baru merupakan orde militer yang hanya mengenal sistem komando. Soedjatmoko yang pada tahun 1957 bersikukuh mempertahankan etika akademik dan menentang intervensi kepentingan politik dalam dunia akademik pun pada masa Orde Baru tidak berdaya. Dalam ceramah pada penataran ahli-ahli Sejarah di FS, UI Jakarta pada tanggal 16 Januari 1973, Soedjatmoko menjelaskan sebagai berikut:

Setiap kenyataan sosial diwujudkan, dijelmakan oleh suatu aktivitas yang mempunyai arti subyektif. Maka kalau kita bicara mengenai sejarah, tidak cukup kalau kita hanya mengatakan bahwa semuanya yang ada di masyarakat berakar pada masa yang lampau. Kita harus mengatakan bahwa kenyataan hari ini itu hanya dapat diartikan, kalau kita mampu menangkap arti keaktifan yang menjelmakan kenyataan sosial itu, dan kita hanya dapat menangkap arti itu jikalau kita juga melihat sekaligus pandangan dan harapan mengenai hari depan yang menggerakkan keaktifan itu. Maka dalam menghadapi realitas sosialnya, suatu bangsa selalu hidup dalam ketegangan. Ketegangan yang timbul karena jarak antara perspektif dan pengertian-sejarah yang menjelmakan kenyataan hari ini dengan realitas hari ini itu, dan ketegangan yang timbul antara kenyataan realitas sosial yang dihadapkan dengan cita-citanya yang akhirnya memungkinkan manusia untuk mengatasi kenyataan itu. Maka dengan demikian berubahlah kenyataan itu. Segi penglihatan realitas sosial ini bagi suatu bangsa ialah subyektivitasnya, dalam mencari arti hari ini sebagai buah daripada yang sudah, dan sebagai pangkal dari yang mendatang. Maka suatu bangsa yang sedang membangun, suatu bangsa yang sedang berjuang, tidak bisa lain daripada melangkahkan kakinya pada jalan yang disinari oleh cita-citanya, dengan penuh kesadaran tentang yang sudah, yaitu sejarahnya.

Dari penjelasan itu terlihat bahwa Soedjatmoko hendak menyampaikan bahwa pemaknaan fenomena historis harus dilandaskan pada cita-cita masyarakat, yaitu pembangunan. Dari sudut pandang ini, Soedjatmoko tidak lagi menempatkan sejarah sebagai ilmu yang harus menutup mata terhadap kepentingan politik. Sebaliknya, dia menganjurkan untuk menempatkan pembangunan yang pada masa itu menjadi kepentingan pemerintah sebagai landasan untuk memaknai sejarah.

Ketidakmungkinan mengambil yang berbeda dengan pemerintah Orde Baru, tidak hanya dialami oleh Soedjatmoko, tetapi oleh hampir semua orang Indonesia, termasuk di dalamnya para sejarawan. Oleh karena itu, wajar apabila Sutherland menyebut kelompok sejarawan pada masa Orde Baru sebagai Sejarawan Profesional Modern (SPM). Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa karakteristik kelompok ini adalah penempatan modernitas kebudayaan Barat sebagai tujuan seluruh umat manusia:

SPM yang baru ini ditandai oleh narasi besar (*grand narration*). Narasi besar adalah narasi dominan yang menampilkan sejarah sebagai kemajuan yang berpuncak pada kejayaan "modernitas" negara-bangsa. Hal ini secara implisit dilihat sama dengan kemenangan politik budaya Barat, karena "modernitas" (sebagai cara berpikir atau cara hidup) dan "modernisasi" (proses perubahan materiil yang ditandai inovasi teknologi dan tata kelola) dirintis oleh masyarakat Barat. Narasi besar SPM bersifat teleologis dalam arti menyajikan semua bergerak ke arah satu tujuan tertentu, sebagai perkembangan dari hal yang sederhana dan tidak sempurna ke hal yang kompleks, rasional dan efisien. Oleh sebab itu, Fukuyama (1992) dapat mengatakan keruntuhan Uni Soviet sebagai pertanda dari "akhir sejarah" karena jika model demokrasi pasar bebas Barat, atau Amerika, telah menjadi pola yang diterima seluruh umat manusia, maka sejarah sudah hampir sampai pada tujuan akhirnya (Sutherland, 2008: 34-35).

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Sutherland memandang sejarawan Indonesia sebagai satu kelompok, satu ideologi dan satu pandangan dengan pemerintah Orde Baru, yaitu pendukung pembangunan atau penganut modernisme.

Ketidakberanian khalayak untuk menyampaikan kritik juga terjadi pada kebijakan pemerintah dalam hal pembentukan identitas nasional. Orde Baru lebih menganut model *melting plot*, yaitu menciptakan identitas baru dan meninggalkan atau menghapuskan identitas lama yang berorientasi kesukuan maupun kelompok keagamaan. Dari sudut pandang ini, produksi wacana "satu bahasa" melalui buku teks dapat dipahami sebagai usaha pemerintah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengganti bahasa daerah dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Tidak hanya itu, pemerintah juga melarang pembicaraan di ranah publik berbagai isu dan permasalahan yang menyangkut suku, adat, ras dan agama (Denny, 2006: 152). Dengan dilarang untuk menjadi bahan pembicaraan, secara tidak langsung pemerintah meminggirkan dan menegasikan masalah suku, adat, ras dan agama.

Homo Pancasilaensis. Salah satu representasi dari penganutan *melting plot* adalah pelaksanaan ujicoba membentuk atau menciptakan identitas nasional Indonesia yang mampu diterima dan dihayati oleh semua warga. Identitas ideal Indonesia itu dikenal sebagai homopancasilaensis. Secara konseptual, homo Pancasilaensis atau manusia Pancasila adalah:

suatu kepribadian superordinat dan ideal yang dihayati bersama, hadir dalam benak setiap individu, dan dengandemikian menjadi sumber penting baik bagi identitas nasional maupun personal. Kepribadian seperti ini diharapkan akan memberikan inspirasi yang kuat dan positif bagi negara kesatuan yang baru keluar dari penjajahan ini. Homo pancasilaensis juga dianggap perlu untuk mewartakan dan mengekang ikatan-ikatan dan perasaan-perasaan primordial yang dianggap berbahaya (Gismar, 2008: 201).

Kepribadian itu diharapkan mampu memberi inspirasi yang kuat dan positif bagi negara kesatuan Indonesia yang relatif masih belum lama keluar dari penjajahan. Homo pancasilaensis juga dipandang mampu mewartakan dan mengekang ikatan-ikatan dan perasaan-perasaan primordial yang berbahaya.

Penciptaan identitas nasional baru di atas merupakan payung dari berbagai kebijakan Orde Baru dalam bidang sosial budaya, sehingga kesaling bergayutan antar program dapat ditemukan dengan relatif jelas. Keterkaitan antara wacana "satu bahasa" dengan pembentukan homo Pancasilaensis dinyatakan dengan tegas dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang P4. Dalam salah satu pertimbangannya, MPR secara tegas

menyatakan “demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” (Tap MPR No. II/MPR/1978).

Pentingnya membentuk homo Pancasilaensis atau manusia Pancasila ditekankan oleh Presiden dalam pidatonya di depan Musyawarah Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 12 April 1976. Presiden Suharto menyatakan:

... membangun manusia pembangunan tidak lain adalah berarti membangun manusia Pancasila. Kita semua mengharapkan agar Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan tunas bangsa kita itu hendaknya dapat menjadi pelopor daripada pembentukan dan pembangunan manusia-manusia Pancasila...

Pancasila sama sekali bukan hanya semboyan besar yang selalu kita agung-agungkan... Yang paling penting adalah agar Pancasila itu benar-benar kita rasakan wujudnya secaranyata dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pribadi, dalam tatapergaulan hidup dengan sesama anggota masyarakat... Pendeknya, Pancasila harus terasa dan mempunyai arti dalam segalascgi kehidupan kita masing-masing dan bersama-sama.

Karena itu lah berulang kali saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara yang mudah dimengerti mengenai penghayatan dan penjabaran Pancasila.

Selain membahas pentingnya membentuk manusia Pancasila, pidato Presiden Suharto juga menekankan bahwa interpretasi tentang Pancasila harus tunggal dan tidak boleh terjadi perbedaan pemahaman.

Karena Pancasila adalah milik kita bersama dan harus kitaamalkan bersama-sama pula, maka kita pun harus bersepakat bulatmengenai pengertian dan penjabaran Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, maka Pancasila dapat kita hindarkan dari penafsiran kita masing-masing, yang mungkin bcrbeda-bcda. Sebab, penafsiran dan penjabaran Pancasila yang berbeda-beda sama saja dengan mengaburkan arti dari Pancasila.

Dua tahun kemudian, isi pidato Presiden Suharto menjadi ketetapan MPR melalui Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dikenal secara luas sebagai P4. Dengan tegas MPR menyatakan bahwa “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya”. Pernyataan itu menjelaskan pemikiran pemerintah bahwa P4 bukan dimaksudkan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara, apalagi mengkritisnya. Sebaliknya, P4 diarahkan untuk menjadi “penuntun dan pegangan hidup” bagi setiap warganegara Indonesia.

Pembentukan homo Pancasilaensis melalui P4 diawali dengan membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) pada tahun 1979. Lembaga itu bertanggungjawab atas terselenggaranya penataran P4 di seluruh wilayah Indonesia. Tahap pertama dilaksanakan penataran untuk instruktur di tingkat nasional. Hasil dari *training of trainers* (TOT) itu adalah sekelompok intelektual yang disebut sebagai Manggala BP7. Selanjutnya para manggala itu melaksanakan TOT di tingkat provinsi dan berlanjut secara berjenjang sampai ke tingkat kabupaten.

Penataran P4 dilaksanakan dengan model indoktrinasi dengan sasaran pelajar dan mahasiswa baru. Setiap tahun ajaran baru, para siswa kelas 1 pada tingkat SMP dan SMA diwajibkan mengikuti Penataran P4 selama 40 jam. Di pihak lain, untuk mahasiswa baru penataran berlangsung selama 100 jam. Selama 10 jam setiap hari (8 jam untuk siswa SMP dan SMA), para mahasiswa baru diharuskan duduk dan mendengarkan ceramah. Pada bagian

akhir, waktu yang diperlukan lebih dari 10 jam, karena harus mengerjakan tugas-tugas kelompok. Mencontoh militer, dalam penataran ini nama mahasiswa tidak digunakan dan diganti dengan sederet angka yang menunjukkan Nomor Peserta Penataran (NPP).

Materi penataran adalah lima sila Pancasila yang dikembangkan menjadi 36 dan kemudian 45 butir-butir Pancasila. Sebagai gambaran adalah sila ke lima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang dijabarkan menjadi 11 butir: (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, (4) Menghormati hak orang lain, (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, (9) Suka bekerja keras, (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Kritik. Secara konseptual, mega proyek pembentukan homo Pancasilaensis tidak sesuai dengan gagasan para pendiri bangsa. Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945, Pancasila dimaksudkan sebagai dasar dan ideologi negara. Soekarno sebagai penggagas Pancasila, dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyatakan:

Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "*Philosophische grondslag* itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta *philosophischegrondslag*, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu "*Weltanschauung*", diatas mana kita mendirikan negara Indonesia itu...

...saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi (Diunduh dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38157/1/Appendix.pdf> pada tanggal 7 Maret 2015)

Dari pidato itu, Pancasila dimaksudkan sebagai asas atau dasar dimana para penyelenggara negara berpijak ketika mengambil kebijakan publik. Pancasila sama sekali tidak diarahkan untuk menjadi landasan hidup penduduk, baik sebagai pribadi maupun kelompok. Sebetulnya pemikiran itu sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa yang tergabung dalam Panitia 5. Pada awal tahun 1975, Panitia 5 yang diketuai oleh Mohammad Hatta diminta oleh Presiden Suharto untuk memberi penjelasan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah melakukan pertemuan di rumah Hatta, akhirnya tersusun tulisan yang diberi judul "Uraian Pancasila". Dalam seluruh uraiannya, Panitia 5 menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara, panduan penyelenggaraan pemerintahan dan bukan etika sosial. Salah satunya adalah ketika membahas tentang Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditegaskan bahwa Pancasila:

tidak saja pedoman bagi politik dalam negeri, tetapi juga bagi politik luar negeri, karena di dalam Pembukaan disebutkan sebagai tugas Pemerintah Republik Indonesia, di sebelah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa juga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebab itu politik luar negeri Republik Indonesia ialah politik bebas dan aktif (Hatta, 1980: 27-28).

Pergeseran posisi Pancasila dari dasar negara menjadi sekedar etika sosial menjadikan kecurigaan terhadap adanya kepentingan praktis berkembang cukup luas. Watson(dalam Song, 2008) memandang bahwa penataran P4 merupakan usaha pemerintah untuk meredam kritik, terutama sejak meletusnya Malari 1974. Akibatnya, sejak dilaksanakan penataran P4, setiap pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintah diberi label sebagai “anti Pancasila”.

Political opponents of the New Order were routinely labeled “anti-Pancasila”. In 1995, for example, four critical professors, Sri Bintang Pamungkas, Mulyana W. Kusumah, Arief Budiman and George Aditjondro, were among fifteen individuals accused by armed forces Chief of Staff Soeyono of being “anti-Pancasila”, and using “communist methods” to spread their ideas. These accusations echoed allegations made earlier by President Soeharto that certain “formless organizations” [Organisasi Tanpa Bentuk or OTB] were using democracy and human rights as a ruse to propagate ideas contrary to Pancasila. (Human Right Watch, 1998: 86).

Selain sebagai peredam kritik, wacana pembentukan manusia Pancasila juga dipandang sebagai usaha penyamaan atau penyeragaman pola pikir dan pola tindak. Penyeragaman itu antara lain tampak pada usaha mewacanakan interpretasi tunggal terhadap Pancasila dan bahkan sakralisasi. Sebagai puncaknya, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 8 Tahun 1985 yang mengharuskan semua organisasi kemasyarakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Pandangan yang berkembang adalah bahwa peraturan asas tunggal Pancasila terutama ditujukan untuk lebih mengontrol organisasi-organisasi Islam.

Konsep asas tunggal ini melahirkan oposisi dan beragam elemen dan tokoh Islam. Beberapa menganggapnya sebagai usaha pemerintah untuk memaksakan program sekularisasi terhadap pandangan hidup Islam. Beberapa yang lain memandang kebijakan pemerintah ini sebagai warisan dari kebijakan kolonial Belanda yang membolehkan kaum Muslim untuk menjalankan peribadatan keagamaannya, tetapi membatasi semua bentuk Islam politik.

Meski terdapat ketidakpuasan dan penentangan yang kuat dari kelompok-kelompok dan para pemimpin Islam. kebijakan ini pada akhirnya diterima oleh organisasi-organisasi Islam yang besar. Sementara organisasi-organisasi Islam seperti PII dan kelompok pecahan dari HMI, yaitu HMI-MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Pertimbangan Organisasi, berdiri tahun 1986), yang tetap tak bersedia menerima asas tunggal, dilarang keberadaannya atau terpaksa menjadi gerakan-gerakan bawah tanah (Latif, 2005: 491-493).

Dampak. Mega proyek pembentukan homo Pancasilaensis atau manusia Pancasila membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dan masa depan. Salah satu dampak yang dirasakan adalah semakin terpinggirkannya kebudayaan daerah. Oleh karena tekanannya yang sangat kuat pada pentingnya budaya nasional, konsep "budaya tradisional" sering hanya menyisakan "seni budaya" atau "kesenian daerah" dan itupun sering hanya mencakup tari-tarian, pakaian tradisional, kerajinan tangan, dan kadang arsitektur (Gismar, 2008: 207).

Bahasa daerah sebagai salah satu wujud kebudayaan daerah, alat komunikasi dan media representasi budaya secara bertahap terkerdilkan. Pada generasi hasil penataran P4 dan setelahnya kosa kata bahasa daerah yang dikuasai semakin lama semakin sedikit. Kelemahan itu ditambah dengan kekuranganmampuan dalam menggunakan tata krama bahasa, menjadikan mereka lebih percaya diri menggunakan bahasa Indonesia dari pada bahasa daerah. Pada masyarakat perkotaan, komunikasi antar warga, baik formal maupun informal, lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Di daerah pedesaan, komunikasi informal masih lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Akan tetapi, pada pertemuan-pertemuan semi formal, seperti rapat dasawisma bagi ibu-ibu maupun rapat Rukun Tetangga, alat komunikasi yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Akibat lebih tragis dirasakan oleh etnik yang memiliki bahasa tulis berbeda dengan bahasa Indonesia. Pada etnik Jawa yang memiliki huruf Jawa untuk komunikasi tertulis dapat dikatakan hampir punah. Populasi penduduk yang terampil membaca dan menulis dengan menggunakan huruf Jawa dewasa ini sangat sedikit dan rata-rata telah berumur lebih dari 70 tahun. Dilihat dari produktivitasnya, tulisan dengan menggunakan huruf Jawa bahkan dapat dikatakan telah mati. Karya sastra Jawa, seperti cerita pendek dan puisi, yang terbit di ranah publik seluruhnya ditulis dengan menggunakan huruf latin.

Keterpinggiran budaya daerah yang ditandai oleh jumlah pendukungnya yang semakin merosot merupakan penanda penting akan hilangnya identitas etnik, terutama di kalangan generasi muda. Hancurnya kebudayaan daerah merupakan realitas pahit yang harus dihadapi oleh anggota ribuan etnik di Indonesia dan hampir mustahil untuk dapat bangkit. Di pihak lain, mega proyek pembentukan manusia Pancasila atau homo pancasilaensis masih tetap imajiner sampai sekarang. Gagasan untuk menciptakan kebudayaan nasional dengan mengikuti model melting pot pun kandas bersama berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998.

Kegagalan menciptakan kebudayaan nasional dan kehancuran budaya daerah merupakan modal yang sungguh sangat berharga untuk menjadi pesimis dan bahkan apatis terhadap masa depan bangsa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akhir-akhir ini terjadi kecenderungan merosotnya identitas nasional, terutama dalam diri generasi muda. Hilangnya identitas daerah dan kegagalan membentuk identitas nasional menjadikan masyarakat Indonesia dewasa ini digambarkan sebagai masyarakat linglung. Nordholt menjelaskan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak memiliki sejarah dan hidup tanpa sejarah:

The main line of argument -- reflecting the leading obsession of the New Order -- is that 'guided unity' leads to prosperity whereas disunity results in chaos and decay. This is presented through a series of 'true historical facts', which carry a moral meaning. Because these 'facts' and their moral implications are closely related to the fate of the state, they are far removed from the historical experience of ordinary people. To them the term 'sejarah' became another word for 'not us'.

... Like in the colonial period, New Order historiography produced histories without people.

After Suharto's fall in May 1998, his version of the history was no longer credible -- the economic miracle had collapsed, order was replaced by disorder -- but an alternative national history has not yet emerged. In this sense Indonesians became a 'people without history' (Nordholt, 2004: 10-11).

Lunturnya identitas lokal dan kegagalan membentuk identitas nasional membawa akibat yang kompleks, salah satunya adalah lemahnya karakter masyarakat, sehingga sangat mudah diombang-ambingkan oleh dinamika kehidupan sehari-hari (Fromm, 1961; Heidegger, 1996). Kajian antropologis menemukan bahwa masyarakat Indonesia terjankit xenocentrisme, yaitu kebanggaan terhadap penggunaan unsur-unsur budaya asing, khususnya budaya Barat, yang relatif mendalam (Wallach, 2002). Dalam sebuah reportase memperingati hari kemerdekaan RI, terungkap bahwa makna Indonesia dalam pandangan generasi muda adalah sekedar tempat lahir atau tinggal saja:

Ask young Indonesians today what makes them Indonesians, and the answer may likely surprise, or disappoint you.

"I'm Indonesian because I was born in Indonesia and I'm a citizen of Indonesia, I just have to live with that," Intan Nirwani, a 14-year-old high school student, said when she was asked about what it meant being an Indonesian.

Swastika, 24, an anchor at a TV station and also Javanese, gave a similar answer. "It's just a statistical status. I mean...you are Indonesian because your ID and your passport

say so," Swastika stated.

It may be a false assumption to say that Intan and Swastika represent the general feeling of Indonesia's younger generation about their country, but their answers reflect a growing trend among the younger generation. They seem to have grown further away from the sense of being Indonesian that was still very much alive among the previous generations.

For many of today's young people, being Indonesian means nothing more than a "geographical fact" -because they were born and raised in the country. Nothing more, nothing less (The Jakarta Post, 16 Agustus 2002).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa banyak diantara kaum muda Indonesia yang merasa memiliki ikatan emosional dan historis dengan Indonesia. Mereka menempatkan Indonesia sekedar sebagai wilayah geografis saja.

Akibat negatif dari produksi wacana "satu bahasa" memberikan kesadaran bahwa historisitas tidak dapat dipenggal atau gunting putus. Secanggih apapun kehidupan modern, orang tetap membutuhkan berbagai aspek dari kebudayaan tradisional:

In traditional cultures, the past is honoured and symbols are valued because they contain and perpetuate the experience of generations. Tradition is a mode of integrating the reflexive monitoring of action with the timespace organisation of the community. It is a means of handling time and space, which inserts any particular activity or experience within the continuity of past, present, and future, these in turn being structured by recurrent social practices. Tradition is not wholly static, because it has to be reinvented by each new generation as it takes over its cultural inheritance from those preceding it. Tradition does not so much resist change as pertain to a context in which there are few separated temporal and spatial markers in terms of which change can have any meaningful form (Giddens, 1996: 37).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaan bahwa tradisi adalah sangat bernilai bagi hidup masyarakat sekarang, karena di dalamnya terkandung pengalaman hidup berbagai generasi masa lampau. Selain itu, tradisi bukan sesuatu yang kuno, karena selalu diwariskan dan diperbaharui oleh setiap generasi. Dengan demikian, tradisi akan mampu digunakan menghadapi modernisasi. Oleh karena itu, pemikiran Orde Baru yang menempatkan modernitas berhadapan-hadapan atau berseberangan dengan tradisi merupakan kekeliruan yang cukup fatal.

Kegagalan Orde Baru menciptakan identitas nasional mengakibatkan generasi muda yang terlanjur tidak lagi memiliki ikatan kuat dengan identitas lokal berusaha mencari identitas yang cocok bagi mereka. Tidak sedikit dari mereka yang memilih kepemilikan terhadap barang (*sense of having*) sebagai identitasnya, sehingga berkembang menjadi generasi konsumtif. Akan tetapi, banyak pula dari mereka yang hidup tanpa identitas. Untuk kasus yang terakhir ini, mengingatkan pada sejarawan hebat Indonesia, yaitu Sartono Kartodirdjo yang menjelaskan sebagai berikut:

Tanpa identitas, sukar bahkan mustahil melakukan komunikasi dalam masyarakat. Identitas mendefinisikan status dan peran seseorang, mencakup ciri-ciri pokok seseorang baik yang fisik maupun sosial-budaya... Jika seseorang kehilangan memori, antara lain karena senilitas atau penyakit syaraf, timbullah pada dirinya kekacauan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kecuali tidak mampu mengenal identitas dirinya sendiri, dia juga tidak dapat menentukan identitas orang lain. Akibatnya ialah miskomunikasi terus menerus (Kartodirdjo, 2005: 114-115).

Panggung politik nasional dan lokal yang dengan jelas mementaskan miskomunikasi terus menerus akhir-akhir ini kiranya merupakan penanda akan adanya generasi tanpa identitas di atas.

Terobosan yang mungkin ditempuh adalah mendorong generasi muda untuk hidup dan

menghidupi identitas lokal sebagai modal paling mendasar. Langkah itu bukan berarti mengingkari identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Secara teoritis, integrasi nasional paling tidak mengandung dua unsur utama, yaitu integrasi vertikal yang berkaitan dengan hubungan antara elite dengan massa rakyat serta integrasi horisontal yang terkait dengan dinamika sosio kultural daerah dan penciptaan hubungan yang kohesif dengan daerah-daerah lain secara nasional (Sjamsuddin dalam Bahar dan Tangdililing, 1996: 4). Dari sudut pandang ini, identitas nasional bukan merupakan mega proyek dari atas ke bawah, tetapi hasil dari dinamika sosio kultural di tingkat daerah. Purwanto (2006: 182) menjelaskan:

Berbagai fakta sejarah yang ada juga menunjukkan bahwa pada tingkat lokal tertentu, proses pembentukan identitas keindonesiaan berjalan seiring dengan identitas etnik. Dua-duanya mengalami proses transformasi secara sinergis membentuk identitas masing-masing tanpa harus saling bertentangan. Akibatnya, masing-masing lokalitas memiliki ciri tersendiri tentang keindonesiaan mereka. yang tidak dapat begitu saja disamakan atau identik dengan identitas keindonesiaan dalam arti umum pada tingkat nasional.

Dari kutipan di atas Purwanto menjelaskan bahwa transformasi ke identitas keindonesiaan tidak disertai dengan terhapusnya identitas lokal. Dengan kata lain, identitas masyarakat Indonesia berupa lapisan-lapisan identitas dari individu ke bangsa yang masing-masing berjalan beriringan tanpa saling bertentangan. Di lain pihak, identitas lokal/etnik merupakan modal sangat penting dalam membangun nasionalisme Indonesia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Wacana "Satu Bahasa" yang diproduksi dan direproduksi oleh pemerintah melalui buku teks pelajaran sejarah SMA menjadi salah satu penanda perkembangan historiografi pendidikan Indonesia berada di bawah pengaruh Orde Baru. Melalui wacana itu, pemerintah berusaha mengeliminasi identitas lokal yang bersifat etnosentris, tradisional dan primordial untuk digantikan dengan identitas nasional yang modern. Akibatnya generasi muda Indonesia tidak lagi menggunakan berbagai simbol identitas lokal, seperti bahasa, adat istiadat dan pakaian lokal. Mereka menganggap identitas lokal sebagai simbol kekolotan atau ketradisional yang tidak lagi cocok dengan dengan kehidupan modern.

Di pihak lain, pemerintah mempromosikan kehebatan identitas nasional yang disebut sebagai manusia Pancasila atau homo Pancasilaensis. Melalui program nasional yang dikenal sebagai penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Orde Baru bermaksud membangun identitas nasional yang bebas dari sifat primordial dan mendukung modernisme. Setiap tahun ajaran baru, siswa dari tingkat pendidikan yang lebih rendah dan diterima pada tingkat pendidikan SMP dan SMA, serta mahasiswa baru, diwajibkan untuk mengikuti penataran P4. Akan tetapi, dalam perjalanannya mega proyek penciptaan identitas nasional mengalami kegagalan. Selain karena memang sejak awal Pancasila diciptakan untuk landasan pengelolaan negara dan bukan etika sosial, kegagalan itu juga Orde Baru tidak seharusnya menempatkan modernitas berhadapan dengan tradisi. Begitu pula dengan identitas nasional tidak seharusnya digunakan untuk menggantikan identitas lokal. Identitas lokal dan identitas nasional seharusnya dapat berkembang beriringan dengan tanpa saling menegasikan atau bahkan saling meniadakan.

B. Saran

Tidak dapat dihindari bahwa kurikulum pendidikan akan selalu dipengaruhi oleh kelompok kekuasaan. Permasalahannya terletak pengaruh apa saja yang dapat diterima.

Apabila pengaruh itu sungguh-sungguh mengembangkan kontinuitas berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat Indonesia, kiranya akan baik untuk diterima. Akan tetapi, apabila pengaruh itu hendak gunting putus historisitas bangsa Indonesia atau mengubah identitas sosio kultural masyarakat, kiranya perlu ditolak.

Akan tetapi menerima dan menolak itu bukanlah keputusan yang mudah, terutama bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Agar dapat memilih dan membuat keputusan, lembaga pendidikan perlu diberdayakan agar menjadi lembaga yang benar-benar mandiri, termasuk organisasi-organisasi profesi guru yang berada di dalamnya. Tanpa pengembangan kemandirian, lembaga pendidikan akan menjadi lahan yang digunakan oleh kelompok-kelompok kekuasaan untuk menjalankan kepentingan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. W., 2000. *Official Knowledge: Democratic Education in A Conservative Age*. Second Edition. New York: Routledge.
- Badrika, I Wayan, 1997. *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum untuk SMA*, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Bahar, S., dan A. B. Tangdililing, 1996. *Integrasi nasional : teori, masalah dan strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Crawford, K., 2001. Constructing national memory: The 1940/41 Blitz in British history textbooks. *Internationale Schulbuchforschung* 23. Verlag Hahnsche Buchhandlung . ISSN 0172-8237.
- Curaming, R., 2002. *Toward Reinventing Indonesian Nationalist Historiography* yang terdapat pada http://kyotoreview.cseas.kyotou.ac.jp/issue/issue2/article_245.html Diunduh pada 5 Januari 2008.
- Denny J. A., 2006. *Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Derrida, J., (1997). *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. London: The Johns Hopkins University Press.
- Fromm, E., 1961. *Marx's Concept of Man*. Translated in English by T. B. Bottomore. New York: Frederick Ungar Publishing Co.
- Giddens, A., 1996. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Gismar, A. M., 2008. "Mencari Indonesia" dalam Komarudin Hidayat dan Putut Wijanarko, peny., *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Mizan.
- Hatta, M., dkk., 1980. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Mutiara.
- Hedeigger, M., 1996. *Being and Time*. Diterjemahkan dari bahasa Jerman ke dalam bahasa Inggris oleh Joan Stambaugh. New York: SUNY.
- Human Right Watch, 1998. *Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto-Era Barriers*. New York: Human Right Watch.
- Kartodirdjo, S., 2005. *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Latif, Y., 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad XX*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Mihardja, A. K., 1986. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Moedjanto, G., dkk., 1992. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid 3. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Mustopo, H., dkk., 2007. *Sejarah SMA*. Jilid 2. Surabaya: Yudhistira.
- Nordholt, H. S., 2004. *De-colonising Indonesian Historiography*, Paper delivered at the Centre for East and South-East Asian Studies public lecture series "Focus Asia", 25-27

- May, 2004 at Lund University, Sweden.
- Notosusanto, N. dan Basri, Y., ed., 1981. *Sejarah Nasional Indonesia Untuk SMA*. Jilid 3. Buku paket. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Notosusanto, N. dan Basri, Y., ed., 1992. *Sejarah Nasional Indonesia Untuk SMA*. Jilid 3 (Buku Paket). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pidato Presiden Suharto pada pembukaan Musyawarah Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka* tanggal 12 April 1976.
- Purwanto, B., (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesia?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Renan, E., 1882, "What is A Nation?" dalam Woolf, Stuart, ed.. (1996). *Nationalism in Europe, 1815 to Present*. London: Routledge.
- Soedjatmoko, 1973. *Kesadaran Sejarah dan Pembangunan*. Disampaikan pada ceramah penataran ahli-ahli sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia tanggal 16 Januari 1973.
- Soewarso, I., 1986. *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*. Jilid 3. Surakarta: Widya Duta.
- Sutherland, H., (2008). "Meneliti sejarah penulisan sejarah" dalam Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari, ed. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tap MPR No. II/MPR/1978.
- Tarunasena, 2009. *Sejarah SMA/MA*. Jilid 2. Bandung: Armico.
- The Jakarta Post*, 16 Agustus 2002.
- Utomo, D., 2012. "Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa" dalam *Jurnal Kearsipan* Volume 7/ANRI/12/2012. ISSN 1978 130X.
- Wallach, J., 2002. "Exploring Class, Nation and Xenocentrism in Indonesian Cassete Retail Outlet". Artikel pada jurnal *Indonesia* vol. 74 (Oct. 2002), page 79-102. Southeast Asia Program Publications at Cornell University.
- Widyosiswoyo, S., 1979. *Sejarah Untuk SMA*, Jilid 1. Klaten: Intan.
- Wodak, R. and M. Meyer (eds.), 2006. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38157/1/Appendix.pdf>.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
YOGYAKARTA